

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Martina Lunau¹, Masjaya², Bambang Irawan³

¹ Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

² Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ³

Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Alamat Korespondensi: martinalunau03@gmail.com

Abstract: *The purpose of the study was to analyze the implementation of cashless food assistance in Long Bagun District, Mahakam Ulu Regency, and examine the supporting and inhibiting factors for its implementation. The research approach is descriptive qualitative with analytical techniques using interactive model analysis. The results of this study indicate that the implementation of cashless food assistance in Long Bagun District has been running according to the mechanism in the general guidelines, starting from the preparation stage carried out in coordination with the Central Government, and the ranks of stakeholders in the region to the village level. The implementation has also been carried out correctly by the general guidelines. The Education/Socialization phase has been carried out starting from the registration and distribution phase. Then in the distribution stage, it is carried out by Bank BRI. Furthermore, the location of utilization and distribution of assistance has been according to a predetermined schedule. However, the inhibiting factors found were the low capacity of the sub-district apparatus and villages and the difficulty of accessing the sub-districts and village in the interior at the time of distributing and socializing. Then another inhibiting factor was the limited internet network in Mahakam Ulu Regency.*

Keywords: Implementation, cashless food assistance.

Abstrak: Tujuan Penelitian untuk menganalisis implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian ini bahwa implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Long Bagun telah berjalan sebagaimana mekanisme dalam pedoman umum, mulai dari tahap persiapan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, jajaran stakeholder di daerah sampai dengan tingkat kampung. Pelaksanaannya juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman pedoman umum. Tahap Edukasi/Sosialisasi telah terlaksana dimulai dari fase registrasi dan distribusi. Kemudian dalam tahap penyaluran dilakukan oleh Bank BRI. Selanjutnya tahap pemanfaatan dan penyaluran bantuan telah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun faktor penghambat yang ditemukan adalah rendahnya kemampuan sumberdaya Aparatur Kecamatan dan kampung-kampung dan sulitnya akses menuju Kecamatan-kecamatan dan kampung-kampung yang ada di pedalaman pada saat melaksanakan penyaluran dan sosialisasi, kemudian faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya jaringan internet yang ada Kabupaten Mahakam Ulu.

Kata Kunci: Implementasi, bantuan pangan non tunai

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di dalamnya terdapat strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan pasal 3 tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan : “a) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; d) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan”.

Dalam rangka melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan pada beberapa kluster dan kluster Rastra, Raskin, dan Bantuan Pangan Non Tunai masuk dalam Klaster-I yaitu Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program ini memiliki tujuan utama yaitu mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi melalui program yaitu Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Program Bantuan Siswa Miskin, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Raskin. Menurut (Hasimi, 2020) “keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi)”. Menurut pedoman umum Program Sembako (Manusia and Kebudayaan, 2020) “program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein”. Namun seiring berjalannya Program Rastra dinilai masih banyak kekurangan diantaranya kurangnya akurasi penetapan sasaran bantuan, jumlah bantuan yang berkurang, waktu penerimaan bantuan yang lama, sampai kualitas bantuan yang buruk, lalu bahan pangan seperti beras juga sangat mudah dicemari hama seperti kutu serta tikus kalau tempat penyimpanan kurang baik atau bersih serta biaya operasional seperti transportasi serta penyimpanan sangat tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait pelaksanaan Program Subsidi Raskin/Rastra, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan transformasi Program Subsidi Raskin/Rastra menjadi Program Bantuan Sosial Pangan dengan tujuan untuk memastikan program telah berjalan sesuai dengantujuannya.

Program Bantuan Non Tunai akan dilaksanakan di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti sinyal telekomunikasi yang lemah atau tidak ada sampai dengan akses geografis yang sulit dijangka, hal ini diharapkan agar program ini dapat tuntas menjangkau seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Selain itu juga program ini diharapkan dapat diintegrasikan kesemua program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan yang ada.

Kriteria wilayah 3T dengan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses geografis adalah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai Kabupaten baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2013, adalah wilayah yang didominasi oleh hamparan hutan hujan tropis. Berdasarkan data (BPS,

2021) “luas hutan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 2.413.322 Ha atau sekitar 72% dari keseluruhan luas Kabupaten. Kabupaten ini merupakan kawasan hulu dari Sungai Mahakam yang membentang sepanjang panjang 920 KM dan terpanjang di Provinsi Kalimantan Timur”. Keterbatasan sarana dan prasarana publik karena letak geografis antar kecamatan cukup jauh dan sulit untuk dijangkau, menjadi penghambat dalam penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Sejahtera selama ini. Berdasarkan uraian di atas, olah karena itu peneliti akan mengkaji lebih mendalam implementasi Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

Kerangka Teori

Kemiskinan

Menurut Suparlan (2000) “kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Lebih jauh menurut Suparlan (2000) “secara garis besar, faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu si miskin itu sendiri sementara itu faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu si miskin. Faktor-faktor tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan individu, baik hubungan individu dengan diri individu itu sendiri, individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok yang dalam hal ini adalah dengan sesama masyarakat, ataupun hubungan individu dengan pemerintah”.

Menurut Kementerian Sosial (2020) “tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Sementara itu manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yaitu : a) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; b) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; d) Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan e) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan”.

Implementasi

Menurut Grindle dalam Winarno (2007) “tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system*”. Selain hal tersebut, sarana-sarana tertentu dirancang sedemikian rupa serta dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan sebuah Peraturan atau Kebijakan Pemerintah, terdapat perbedaan target yang ingin dicapai saat melakukan penyusunan peraturan maupun kebijakan tersebut, kemungkinan terjadinya perbedaan ini sangatlah besar. Adapun menurut Wahab (2005) “suatu Implementasi Peraturan Pemerintah yang tidak diterima kelompok sasaran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu kelompok sasaran tidak membutuhkan atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, ini dimungkinkan isi

kebijakan tidak menyentuh kepentingan mereka, kelompok sasaran tidak menyadari manfaat dari kebijakan tersebut dan oleh karenanya mereka tidak membutuhkannya, kelompok sasaran tidak terlalu suka dengan pejabat pelaksanaannya, agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan pelaksanaan tersebut, dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan tahapan-tahapan yang telah disusun dalam pelaksanaan”.

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang terjadi saat ini, kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program jangka pendek agar dapat meringankan beban masyarakat terutama masyarakat yang daya belinya masih tergolong lemah. Tugas implementor adalah mempermudah pelaksanaannya di lapangan. Dengan target kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya akan semakin mempermudah menuju arah yang ingin dicapai termasuk kelompok sasaran dalam kebijakan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan ini peneliti akan dapat menganalisis lebih dalam terhadap implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Mahakam Ulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Hasil dan Pembahasan

Persiapan

Persiapan adalah fase awal dalam melaksanakan kegiatan dimulai dari koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas sosial perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak pelaku pelaksana Program tersebut, seperti yang di jelaskan di atas Dinas Sosial P2PA juga berkoordinasi dengan Bank penyalur di tahap persiapan dalam hal ini Bank BRI Kanca Sendawar unit Ujoh Bilang dalam pelaksanaan penyiapan data KPM dan pembukaan rekeni kolektif yang notabennya harus dilakukan oleh Bank BRI, dalam mempersiapkan berbagai hal memang membutuhkan perencanaan terlebih dahulu dan hal tersebut telah di laksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman umum BPNT Sembako. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa Bank BRI, Dinas Sosial Dan Kecamatan Ujoh Bilang mempersiapkan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera yang akan dibagikan untuk Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan Sosialisasi dimulai dari komunikasi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial serta para pelaksana program di Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi disediakan anggaran baik dari tingkat pusat maupun daerah serta pelaksanaan di tingkat kecamatan dan kampung-kampung. Sementara itu, untuk alur tugas disesuaikan dengan jenjang dalam menyampaikan edukasi dan sosialisasi di

Kabupaten Mahakam Ulu. Dinas Sosial mengkoordinasikan pelaksanaan dengan menggunakan materi sosialisasi dari pusat serta memastikan materi sosialisasi terdistribusi dengan baik, selain itu juga panitia memastikan ketersediaan narasumber dengan target kecamatan, kampung-kampung, pendamping sosial Bansos pangan serta masyarakat umur atau Keluarga Penerima Manfaat.



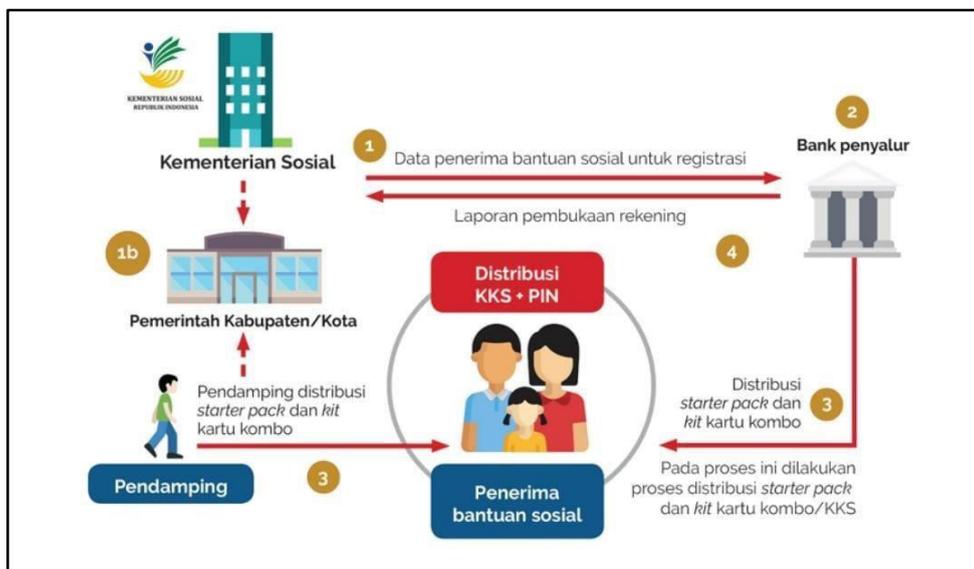
Gambar 1. Sosialisasi Dan Edukasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Sumber : Dokumentasi Penulis (2022).

Berdasarkan data hasil penelitian proses pelaksanaan sosialisasi dan edukasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Bank BRI Unit Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu telah dilakukan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaannya.

Registrasi dan Distribusi

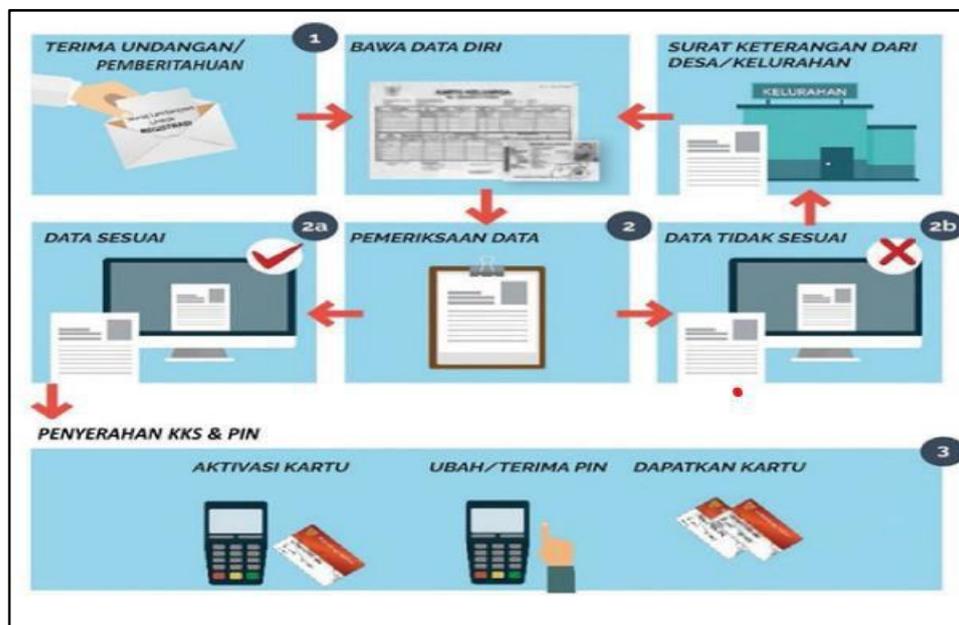
Registrasi dan Distribusi dalam melaksanakan program dilaksanakan bagi Keluarga Penerima Manfaat yang baru ditetapkan sebagai penerima Program Bansos Pangan, namun jika Keluarga Penerima Manfaat telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai, maka tidak di berikan KKS baru atau tetap menggunakan KKS lama untuk mendapat dan memanfaatkan dana bantuan program sembako. Menurut alur registrasi dan distribusi KKS Kementerian sosial mengirimkan data penerima bantuan sosial untuk registrasi ke Bank penyalur kemudian di bukakan rekening kemudian bank penyalur mendistribusikan KKS Bersama Dinas Sosial dan pendamping Bansos pangan kepada penerima bantuan sosial dalam hal ini KPM, merujuk dari hal tersebut maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten beserta Bank BRI secara bersama-sama mempersiapkan distribusi KKS dan juga menentukan lokasi serta jadwal pendistribusian, kemudian setelah menentukan jadwal maka Dinas

Sosial dan Bank penyalur dan pendamping Bansos pangan kecamatan serta aparat kampung bersama-sama melakukan distribusi KKS kepada KPM.



Gambar 2. Alur Registrasi dan Distribusi KKS
 Sumber : (Manusia and Kebudayaan, 2020)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat alur pelaksanaan registrasi dan distribusi KKS pada tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.



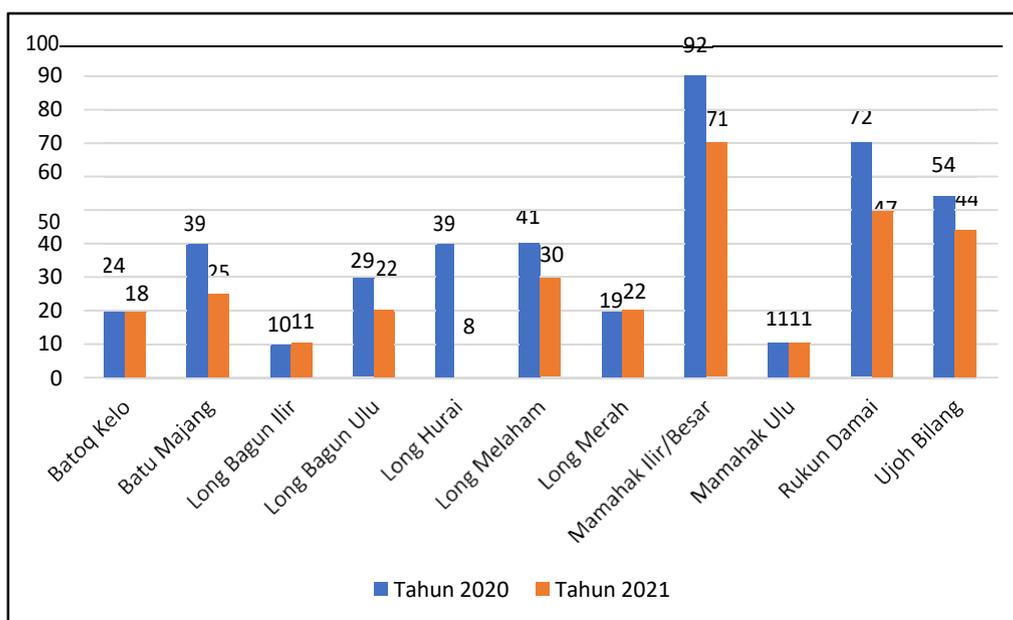
Gambar 3. Pelaksanaan Registrasi dan Distribusi KKS
 Sumber : (Manusia and Kebudayaan, 2020)

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat tergambar bahwa berikut pelaksanaan Registrasi dan Distribusi KKS pada tingkat daerah.

Penyaluran

Penyaluran dilakukan oleh Bank BRI Kabupaten Mahakam Ulu dengan cara memindahbukukan dana bantuan program dari rekening milik Kemensos ke rekening bantuan Pangan yang dimiliki KPM maksimum selama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank BRI, lalu penyaluran dana bantuan program BPNT Sembako ke dalam rekening KPM setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh), konfirmasi penyaluran dana bantuan program BPNT sembako kepada KPM oleh Bank Penyalur dilaksanakan melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAM) dengan peraturan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial program yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan, kemudian untuk proses penyaluran Program BPNT sembako dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya belanja Bansos.

Untuk Kabupaten Mahakam Ulu penyaluran secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai arahan dari Pusat meskipun dengan berbagai masalah di lapangan seperti KPM yang tidak hadir dan lain-lain. Berikut disajikan data Bantuan Pangan Non Tunai Sembako pada Tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut.



Gambar 4. Data Penerima BPNT Sembako di Kecamatan Long Bagun Tahun 2020 dan 2021

Sumber : Diolah Peneliti (2022).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data tersebut tersebar pada 12 Kampung yang ada di Kecamatan Long Bagun dari tahun 2020 hingga 2021.

Walaupun Kecamatan Long Bagun adalah wilayah ibukota Kabupaten, namun dalam proses penyalurannya masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah terkait dengan aksesibilitas untuk menuju kampung yang sulit ditempuh dikarenakan jaraknya yang jauh.

Pemanfaatan

Pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai Sembako dilaksanakan secara bertahap dimulai dari KPM datang ke e-Warong, kemudian KPM melakukan cek kuota melalui mesin EDC, selanjutnya KPM memilih jenis serta menentukan jumlah bahan pangan, setelah itu KPM melakukan pembayaran melalui mesin EDC, dan yang terakhir dilakukan cetak resi dari mesin EDC tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka KPM akan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik dan segera mencairkan bantuannya sesuai jadwal yang di beritahukan oleh Bank BRI.



Gambar 5. Cara Penggunaan e-Warong

Sumber : (Manusia and Kebudayaan, 2020)

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa tahapan dalam pemanfaatan bantuan tersebut dapat dilakukan dengan baik. Namun hal tersebut berjalan sesuai dengan rencana awal jika jaringan internet dalam keadaan baik, namun jika tidak akan mengakibatkan terhambatnya proses/tahapan tersebut.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal yang menjadi penghambatan dari pelaksanaan program ini khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya skill (keahlian) Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan kampung-kampung khususnya tenaga teknis dalam melakukan input serta verifikasi data dan saat ini masih banyak dilakukan oleh tenaga yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mahakam Ulu. Faktor lain yang ditemukan adalah keadaan alam di Kabupaten Mahakam Ulu dengan medan yang cukup berat untuk diakses, walaupun Kecamatan Long Bagun berada di Ibukota Kabupaten, namun infrastruktur jalan masih belum memadai sehingga cukup mengganggu dalam penyalurannya. Kemudian hal lain yang menjadi faktor penghambat adalah tentang masih rapuhnya jaringan optic/internet yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu juga menjadi faktor penghambatnya pelaksanaan BPNT sembako.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu telah berjalan sesuai dengan tahapan, yang terdiri dari :
 - a. Persiapan
Dalam tahap persiapan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai Sembako mengutamakan koordinasi satu dengan yang lainnya seperti koordinasi dengan Pemerintah pusat, jajaran stakeholder di daerah sampai dengan tingkat kampung. Pelaksanaannya juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ada.
 - b. Edukasi/Sosialisasi
Fase edukasi dan sosialisasi dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai Sembako, telah menyampaikan edukasi dan sosialisasi tersebut, dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi juga menggunakan anggaran baik dari tingkat pusat maupun daerah serta pelaksanaan di tingkat kecamatan dan kampung-kampung. Alur tugas sesuai tingkatan, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan pelaksanaan dengan materi yang telah ada serta memastikan bahwa materi tersebut telah sampai kepada para narasumber untuk disampaikan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kampung yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.
 - c. Registrasi dan Distribusi
Fase registrasi dan distribusi dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima Program Bansos Pangan, namun jika Keluarga Penerima Manfaat telah memiliki Kartu Kelurga Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai maka tidak diberikan KKS baru atau tetap menggunakan KKS lama untuk mendapat dan memanfaatkan dana bantuan program sembako dan telah terlaksana sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.
 - d. Penyaluran
Fase penyaluran dilakukan oleh Bank penyalur dengan memindahbukukan dana bantuan program sembako dari rekening Kementerian Sosial ke rekening bantuan Pangan yang dimiliki KPM, penyaluran tersebut juga akan ditransfer ke dalam rekening KPM setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh), telah berjalan, namun beberapa kendala masih terjadi seperti masih ada KPM yang tidak hadir.
 - e. Pemanfaatan
Fase Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai Sembako dilaksanakan secara singkat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, KPM di harapkan mampu memanfaatkan bantuan ini dengan baik dan segera mencairkan bantuannya sesuai jadwal yang di beritahukan oleh Bank Penyalur, dan sejauh ini pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Penghambat implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.
 - a) Rendahnya skill (keahlian) aparatur Kecamatan dan Kampung juga menjadi faktor penghambat terlaksanakannya penyaluran di kampung-kampung dengan baik.

- b) Akses yang tidak mudah menuju Kecamatan dan Kampung yang harus melawati riam untuk melaksanakan penyaluran dan sosialisasi BPNT juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program tersebut di kabupaten Mahakam ulu.
- c) Terbatasnya jaringan internet yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan BPNT sembako.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi perlunya peningkatan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dilapangan khususnya dalam hal verifikasi data. Selain itu diperlukan kebijakan khusus bagi KPM yang ada di daerah pedalaman dalam proses menerima bantuan dan terakhir adalah adanya pembangunan infrastruktur jaringan internet disetiap kampung yang tentunya bukan akan hanya berdampak pada program ini, namun akan bermanfaat bagi program kebijakan lainnya.

Daftar Pustaka

BPS, K.B. (2021) 'Mahakam Ulu Dalam Angka 2021'.

Hasimi, D.M. (2020) 'Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam', *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), pp. 61–72.

Manusia, K.K.B.P. and Kebudayaan (2020) *PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO*.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Republik Indonesia, I. (2015) 'Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.'

Suparlan, P. (2000) 'Kemiskinan Perkotaan dan Alternatif Penanganannya. Ditunjukkan dalam Seminar Forum Perkotaan'. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Wahab, S.A. (2005) 'Analisis Kebijakan Publik', Jakarta. PT. Bumi Aksara [Preprint].

Winarno, B. (2007) *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press(Anggota IKAPI).